

HUKUM DAN WARTAWAN

**Studi Tentang Perlindungan Hukum atas Kebebasan Pers
di *Tempo.co* dan *Kompas.com* dalam Menerbitkan Artikel Berita**

Naskah Publikasi Karya Ilmiah



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

JAFAR SODIQ

NIM: C 100.080.152

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura. Telp (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta 57102

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Kelik Wardiono, S.H., M.H.,cd.Dr.

Selaku Pembimbing Skripsi I

Nama : Inayah S.H., M.H.

Selaku Pembimbing Skripsi II

Telah membaca dan mencermati Naskah Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi dari Mahasiswa

Nama : JAFAR SODIQ

NIM : C100080152

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : HUKUM DAN WARTAWAN. Studi Tentang Perlindungan
Hukum atas Kebebasan Pers di *Tempo.co* dan *Kompas.com* dalam
Menerbitkan Artikel Berita

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 20 Juli 2013

Pembimbing I

(Kelik Wardiono, S.H., M.H., cd.Dr.)

Pembimbing II

(Inayah, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Jafar Sodik. NIM. C100080152. *HUKUM DAN WARTAWAN Studi Tentang Perlindungan Hukum atas Kebebasan Pers di Tempo.co dan Kompas.com dalam Menerbitkan Artikel Berita*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Sebagaimana disebutkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Pasal ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers atau kebebasan pers adalah hak yang mutlak diberikan kepada warga negaranya untuk memperoleh informasi dan berpendapat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kebebasan pers menuntut beberapa macam persyaratan, salah satu yang terpenting adalah yang dikenal dengan istilah “pers bebas”. Pers (dalam hal ini) wartawan harus bebas dari pengaruh Negara/Pemerintah, Perusahaan Pers, dan Masyarakat sipil sendiri.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengakomodasian kebebasan pers dalam artikel berita di media massa dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wartawan yang melakukan proses kerja jurnalistik. Obyek penelitian adalah artikel media massa yang representatif dan relevan terhadap kebebasan pers.

KATA KUNCI: Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Wartawan

A. PENDAHULUAN

Kekerasan yang terjadi pada wartawan *Riaupos*, beberapa waktu yang lalu seolah menjadi pukulan telak bagi supremasi pers di Indonesia. Di era kebebasan informasi yang nyaris tanpa restriksi ini, nampaknya jaminan hukum terhadap profesi wartawan masih saja menemui kerikil tajam.

Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “*dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*”. Dewan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, merinci perlindungan hukum ini wajib diberikan kepada wartawan dari negara, masyarakat dan perusahaan pers¹.

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, Bill Kovach² dalam teorinya menyebutkan perusahaan pers lah yang secara langsung bertanggung jawab atas wartawan. Kovach menyebut relasi keduanya sebagai relasi internal, sementara yang bertanggung jawab secara penuh atas pemberitaan dan ketika terlibat dengan persoalan hukum adalah perusahaan pers. Lebih lanjut Bill Kovach menyebutkan, perusahaan harus menetapkan *rule*-nya secara tegas dengan wartawan untuk menjamin kepastian hukum tentang ketiadaan intervensi perusahaan pers dalam pemberitaan. Hal ini dimaksudkan agar berita atau produk yang dihasilkan bebas dari intervensi dan sesuai dengan hati nurani dan nalar jurnalistik wartawan³.

Ditinjau dari sifatnya, hubungan hukum antara wartawan dan perusahaan pers adalah bersifat privat, sebagaimana sifat Hukum hubungan pengusaha dan pekerja. Hubungan ini didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata⁴. Perikatan yang terjadi antara tenaga kerja dan majikan setidaknya harus memuat unsur-unsur seperti adanya pekerjaan, unsur perintah dan adanya upah⁵.

¹ Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

² Bill Kovach&Tom Rosentiel. 2007. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*.

³ *Ibid.*, hlm. 57

⁴ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14

⁵ Lalu Husni. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 65-66

Dalam relasinya antara perusahaan pers dan wartawan, selalu muncul persoalan yang sangat mendasar. Pertanyaan berupa “kepada siapakah wartawan bekerja?” menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Disatu sisi pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan *pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku*, namun di sisi lain, manajemen memiliki hak untuk menentukan arah pemberitaan berdasarkan proporsi media terkait.

Hal ini yang sering memunculkan dilema di kalangan wartawan pada perusahaan pers yang pemilik modalnya memiliki motif ekonomi atau politik tertentu.

Sama dengan persoalan yang terjadi pada relasi tenaga kerja dan majikan. Kedudukan antara majikan dengan tenaga kerja adalah tidak sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tapi secara sosial ekonomis kedudukan tenaga kerja adalah tidak bebas⁶.

Kenyataan yang terjadi, perusahaan pers, terutama yang sebagian atau seluruh pemodalnya politisi menerapkan kebijakan internal perusahaan yang rawan dengan keberpihakan dan intervensi pemodal. Tidak mengherankan jika arah pemberitaan media menjurus pada arah propaganda politis⁷.

Mengutip pernyataan wartawan senior Ahmad Zaini dalam *kompasiana.com*;

*“.. Pertumbuhan industri media hingga kini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan status dan keselamatan kerja bagi jurnalis. Selain fenomena pemilik media yang masih menolak keberadaan serikat pekerja pers, kini fenomena pekerja tenaga ahli daya (outsourcing) di industri media semakin berkembang.”*⁸

⁶ Abdul Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 6

⁷ Redi Panuju. 2005. *Nalar Jurnalistik: Dasarnya Dasar Jurnalistik*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 10

⁸ Ahmad Zaini. 7 Oktober 2012. *Jurnalis Menolak Status Kontrak* dalam <http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2012/10/17/jurnalis-menolak-status-kontrak/496411/>. diakses pada Senin, 22 Oktober 2012 pukul 15.06 WIB.

Bahkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menolak sistem kerja kontrak pada wartawan yang belakangan makin menjamur pasca munculnya media *online*. Dari sisi posisi tawar, jurnalis yang bekerja dalam sistem kontrak atau *outsourcing* menjadi tidak memiliki daya tawar yang kuat. Hal ini sebagai konsekuensi dari hubungan kerja yang bersifat individual dan sementara. Kondisi tersebut jelas berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat permanen dan kolektif.⁹

Sementara itu, Bagir Manan dalam pembukaan Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2011 yang lalu menyebut setidaknya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam menghambat kemerdekaan pers. Ketiga hal tersebut antara lain¹⁰;

Pertama; faktor publik atau masyarakat. Faktor *Kedua*; kelompok kepentingan (ekonomi dan politik) dan kelompok mapan (*establishment*) yang merasa terganggu oleh pers. *Ketiga*; politisasi pers. Dalam catatan ini politisasi pers atau pers politik dimaknakan pers partisan (*partisanship*) yaitu keberpihakan kepada suatu kekuatan politik yang duduk atau bekerja untuk menduduki kekuasaan negara.

Keadaan seperti ini selain menuntut upaya pemerintah juga menimbulkan pertanyaan, sejauh mana perlindungan hukum yang dilakukan perusahaan pers terhadap wartawan? Maka menarik untuk peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul: **HUKUM DAN WARTAWAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum atas Kebebasan Pers di Tempo.co dan Kompas.com dalam Menerbitkan Artikel Berita)**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan pengakomodasian kebebasan pers di dalam artikel berita yang diterbitkan oleh media massa. Sekaligus mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi Wartawan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Bagir Manan. *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*. <http://www.dewanpers.or.id/page/opini/opini/?id=63>. Diunduh pada hari Jum'at, 28 September 2012 pukul 16.45 WIB.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹¹.

Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers. Karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menyatakan bahwa: *Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.* Penjelasan pasal 8 UU Per tersebut disebutkan, yang dimaksud dengan *Perlindungan Hukum* diatas adalah *jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dewan Pers dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 menyatakan *Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.* Dibanding UU Pers, Dewan Pers menambahkan Perusahaan Pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum kepada Wartawan.

2. Wartawan

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya kami sebut UU Pers) “*Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik*”. Peraturan Dewan Pers juga memberi definisi yang

¹¹ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, <http://etd.eprints.ums.ac.id/5064/> diakses pada hari Selasa, 11 Juni 2013, Pukul 16.57 WIB.

tidak jauh berbeda dari penjabaran UU Pers tersebut, yang menyebut wartawan sebagai “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya”. Kedua definisi diatas menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah; orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur.

Pada dasarnya wartawan yang ada pada era modern, memiliki dua status yaitu sebagai pekerja (*worker*) dan profesi (*prefessional*)¹².

Praktek industrialisasi segala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan ini mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara profesional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai buruh¹³.

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang *profesional*, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, atau pengacara¹⁴. Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca¹⁵.

3. Kebebasan Pers

Kebebasan Pers atau sering disebut Kemerdekaan Pers, dalam istilah Bahasa Inggris disebut *Freedom of the Press*. John C Nerone mendefinisikan *Freedom of the Press*

¹² Bill Kovach&Tom Rosentiel, 2007, *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. hlm. 112

¹³ The World Bank, 2002, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, Washington DC: World Bank Institute Diterjemahkan oleh M. Hamid, hlm. 306

¹⁴ Indah Suryawati, 2011, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia., hlm. 86

¹⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 115

sebagai berikut: “Kebebasan pers atau kebebasan media adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media termasuk berbagai media elektronik dan media cetak.”¹⁶

Pasal 28 UUD 1945 menjadi dasar lahirnya Undang-undang yang menjamin kebebasan pers dan memuat ketentuan-ketentuan tentang Kebebasan Pers yaitu Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers.¹⁷

Kemerdekaan pers disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) menyatakan “*kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin*”.

Dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan pula pers bebas dari tindakan *Penyensoran* dan *Pembredelan*. Penyensoran dijabarkan dalam pasal 1 angka 8 dapat berupa (1) penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan; (2) tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun; dan (3) kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Sedangkan untuk tindakan pembredelan dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 yaitu *penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum*. Penyensoran adalah tindakan preventif, dan pembredelan adalah tindakan represif.

John C. Merrill menyebutkan, kebebasan pers sebagai kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan Tugas mereka sesuai keinginan mereka.¹⁸ Hal ini berkaitan dengan kegiatan jurnalistik pers yang menjadi hak dasar pers sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) *hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi*. Kegiatan jurnalistik juga disebut dalam pasal 1 angka 1 yaitu *meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan*

¹⁶ John C. Nerone, 1995, Last Rites: Revisiting Four Theories of the Press. hlm. 77 “*Freedom of the press or freedom of the media is the freedom of communication and expression through mediums including various electronic media and published materials.*”

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 191

¹⁸ Nurdin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 296

menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Bill Kovach dalam teorinya menambahkan idealnya pers harus memiliki kebebasan melaporkan dan menganalisis semua hal yang bisa direkam dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Kebebasan lainnya, dapat dilihat dari penggunaan Hak Tolak sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (4). Menurut Pasal 1 angka 10 Hak Tolak adalah *hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya*. Hak tolak ini dapat berupa 2 hal, pertama adalah hak untuk menolak menyebutkan sumber berita bahkan dimuka persidangan dan hak untuk menolak memberitakan, sebagai konsekuensi dari teori pers libertarian.²⁰

Seluruh kondisi yang memungkinkan pers untuk bebas bergerak pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kebebasan untuk memperoleh informasi dan berinteraksi. Kebebasan Pers adalah nama generik untuk seluruh hak warga masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membentuk pendapatnya disatu pihak, dan menyatakan pendapat di pihak lain.²¹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat *deskriptif* ²². Karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengakomodasian kebebasan pers di dalam perjanjian kerja yang dilakukan antara wartawan dengan perusahaan pers, dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi wartawan di perusahaan pers dimaksud. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Karena penelitian ini tidak bersifat empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

¹⁹ Bill Kovach dan Tom Rosentiel, *Loc.Cit.*, hal. 11

²⁰ Septiawan Santana K., 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.225

²¹ Dwi Lando, 2002, *Kebebasan Pemberitaan Pers dan Nilai Obyektivitas Pasca Orde Baru*, dalam *Jurnal Penelitian Media Massa* Vol. 5 No. 9 Tahun 2002, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi, hal. 74

²² Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaliipers. Hal. 29

(1) Bahan Hukum Primer: Berita/ tulisan dari media massa online/cetak yang mencerminkan kebebasan pers; dan (2) Bahan Hukum Sekunder: Buku - buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, paper seminar, hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan inventarisasi berbagai data primer dan data sekunder yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menerapkan logika berpikir deduktif. Lalu selanjutnya adalah menarik konklusi, dengan cara membandingkan premis minor dengan premis mayor sehingga pada tahap akhirnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini mengambil *sampling* Artikel berita pada 2 media yang telah dipaparkan diatas. Artikel berita yang diambil adalah Artikel Berita yang diterbitkan pada periode 29 April – 5 Mei 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi terhadap berita-berita yang memenuhi kualifikasi. Kualifikasi sebagaimana telah dipaparkan diatas, yaitu berita yang berkaitan dengan tema-tema Politik, Hukum atau Kriminal. Rata-rata artikel berita politik, hukum dan kriminal yang diterbitkan oleh *Tempo.co* pada periode 29 April – 5 Mei 2013 adalah 54 artikel berita. Sementara pada *Kompas.com* pada periode 29 April – 5 Mei 2013 rata-rata artikel berita yang diterbitkan 61 artikel berita. Untuk itu peneliti mengambil 8 artikel berita untuk masing-masing media dengan asumsi;

- 1) Artikel yang diambil telah memenuhi 10% dari berita yang diterbitkan oleh media terkait, selama periode sehari terbit.
- 2) Artikel berita yang diterbitkan secara umum membahas satu tema yang sama dengan *angle* yang beragam. Dalam beberapa berita juga dibeberkan pokok berita yang sebelumnya telah diterbitkan. Karena itu, berita yang diambil adalah yang paling mewakili tema, dan yang terkini.

D. HASIL PENELITIAN

Kebebasan Pers dapat dilihat dari beberapa kondisi antara lain; *Pertama*, Pers harus Bebas Dari Pencegahan, Pelarangan dan atau Penekanan. *Kedua*, Pers harus bebas dari

tindakan Penyensoran. *Ketiga*, Pers harus bebas untuk memilih, menentukan dan melakukan dalam kerja jurnalistiknya. *Keempat*, Pers harus bebas menggunakan hak tolak.

Pola-pola penerapan kebebasan pers bagi wartawan di *Tempo.co* dan *Kompas.com*:

- a. Pers harus Bebas Dari Pencegahan, Pelarangan dan atau Penekanan: Dari 112 artikel berita yang diteliti, terdapat 18 artikel berita di *Tempo.co* dan 13 berita di *Kompas.com* yang mengakomodasi kebebasan ini, dan terdapat 38 berita di *Tempo.co* dan 43 berita di *Kompas.com*, yang tidak mengakomodasi kebebasan ini Hal mendasarkan pada dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pendapat dari Sudirman Tebba, Masduki dan Teori Pers Libertarian oleh Fried S. Siebert.
- b. Pers harus bebas dari tindakan Penyensoran: Dari 112 artikel berita yang diteliti, terdapat 25 artikel berita di *Tempo.co* dan 22 artikel berita di *Kompas.com* yang mengakomodasi kebebasan ini, terdapat 31 berita di *Tempo.co* dan 34 berita di *Kompas.com*, yang tidak mengakomodasi kebebasan ini. Hal ini mendasarkan pada Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 1 angka 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pendapat dari Septiawan Santana K. dan Teori Pers Libertarian oleh Fried S. Siebert.
- c. Pers harus bebas untuk memilih, menentukan dan melakukan dalam kerja jurnalistiknya: Dari 112 artikel berita yang diteliti, terdapat 56 artikel berita di *Tempo.co* dan 56 artikel berita di *Kompas.com*, yang mengakomodasi kebebasan ini, dan tidak ada yang tidak mengakomodasi kebebasan ini baik pada terbitan *Tempo.co* atau terbitan *Kompas.com* Hal ini mendasarkan pada Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pendapat dari John C. Merrill.
- d. Pers harus bebas menggunakan hak tolak: Dari 112 artikel berita yang diteliti, terdapat 7 berita di *Tempo.co* dan 10 artikel berita di *Kompas.com*, yang mengakomodasi kebebasan ini, terdapat 49 artikel berita di *Tempo.co* dan 46 artikel berita di *Kompas.com*, yang tidak mengakomodasi kebebasan ini Hal ini

mendasarkan pada Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pendapat dari Septiawan Santana K.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa; Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers bagi wartawan *Tempo.co* dan *Kompas.com* sebagai berikut:

- a. Dalam kebebasan pers untuk bebas dari pencegahan, pelarangan dan atau penekanan. Terdapat perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Dalam kebebasan pers untuk bebas dari tindakan Penyensoran. Terdapat perlindungan dalam hal melaksanakan peran pers yaitu (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 dan pendapat dari Septiawan Santana K.
- c. Dalam kebebasan pers untuk memilih, menentukan dan melakukan dalam kerja jurnalistiknya. Terdapat perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta pendapat dari Masduki dan Teori Pers Libertarian oleh Fried S. Siebert

- d. Dalam kebebasan pers untuk bebas menggunakan hak tolak. Terdapat perlindungan dalam hal mengungkapkan narasumber dan sumber berita. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dan 1 angka 10 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers serta pendapat dari Septiawan Santana K.

2. Saran

- a. Pers Bebas harus dipahami lebih dalam lagi. Maksudnya, bukan hanya restriksi dari pihak luar yang perlu dipikirkan. Lebih dari itu, Wartawan juga harus senantiasa berpijak pada keyakinan bahwa mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi independensi yang bersifat internal dari keberpihakan pada berbagai faktor perlu diminimalisir atau dihilangkan. Misalnya dengan memberikan larangan kepada Pers, Wartawan atau Pemilik Perusahaan Pers untuk menjadi partisan Partai atau Ormas tertentu.
- b. Pengaturan dan definisi yuridis perihal Kebebasan Pers perlu di rinci lebih detail. Terutama mengenai hak tolak. Karena, hak tolak yang digunakan dalam beberapa berita justru menimbulkan persoalan baru. Dengan demikian, pedoman penggunaan hak tolak harus secara tegas di rumuskan dalam undang-undang.
- c. Untuk mencegah terjadinya intervensi Perusahaan Pers terhadap kebijakan redaksional produk jurnalistik, perlu diadakan pembatasan secara tegas dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Peran pemerintah dalam hal ini berupa memberikan rumusan hukum yang tepat, yang secara khusus mengatur tentang syarat-syarat atau standar-standar tertentu pada perjanjian kerja wartawan untuk mencegah terjadinya pola hubungan yang sehat antara wartawan dan perusahaan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- K., Septiawan Santana, 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kovach, Bill dan Tom Rosentiel, 2007, *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*, New York: Crown Publisher.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nerone, John C., 1995, *Last Rites: Revisiting Four Theories of the Press*, Urbana: University of Illinois Press.
- Nurdin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers
- Panuju, Rendi, 2005, *Nalar Jurnalistik: Dasarnya Dasar Jurnalistik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Suryawati, Indah, 2011, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia.
- The World Bank, 2002, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, Washington DC: World Bank Institute
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diunduh dari <http://dpr.go.id>
- Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang *Pers* diunduh dari <http://dpr.go.id>
- Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang *Standar Perlindungan Profesi Wartawan*. diunduh dari <http://dewanpers.or.id>
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang *Standar Kompetensi Wartawan* diunduh dari <http://dewanpers.or.id>
- Pedoman Dewan Pers tentang *Standar Perusahaan Pers* diunduh dari <http://dewanpers.or.id>
- Ahmad Zaini. *Jurnalis Menolak Status Kontrak*. <http://kompasiana.com>
- M. Bagir Manan. *Kemerdekaan Pers dan Industrialisasi Media Massa*. <http://www.dewanpers.or.id>
- Rahayu. *Pengangkutan Orang*. <http://etd.eprints.ums.ac.id/5064/>
- Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi, *Jurnal Penelitian Media Massa* Vol. 5 No. 9 Tahun 2002, Surabaya: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi.